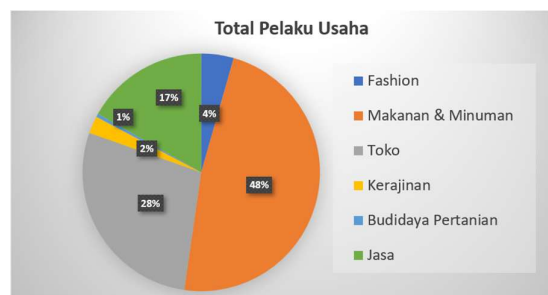


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu kegiatan perekonomian yang menyumbang besar dalam mendorong laju perkembangan ekonomi negara (Pradipta & Kristanto, 2024). Menurut Farida et al. (2019) UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri serta dikelola dan dijalankan oleh individu atau kelompok. Padatnya perekonomian di Indonesia menjadikan UMKM sebagai salah satu kegiatan yang menyerap tenaga kerja dari kalangan rumah tangga hingga kalangan muda. Dilansir dari data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa UMKM menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka tersebut menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran sebagai salah satu kegiatan yang menopang stabilitas ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dilansir dari Kominfo (2023) sejak tahun 2018-2022 Kota Surabaya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2025 Kota Surabaya memiliki 108.073 UMKM, hal ini terlihat pada gambar kategori pelaku UMKM.



Gambar 1. 1 Kategori Pelaku UMKM Kota Surabaya
Sumber: Sistem Informasi Perdagangan (SIP) UMKM Kota Surabaya

Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa kategori pelaku usaha di dominasi oleh UMKM Sektor Makanan dan Minuman dengan total pelaku usaha sebanyak 51.731 atau 48%, menunjukkan bahwa UMKM sektor makanan dan minuman memiliki kontribusi terbesar terhadap aktivitas perekonomian di Kota Surabaya, hal ini sejalan dengan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadikan makanan dan minuman sebagai komoditas utama dalam kehidupan sehari-hari.

Era globalisasi ini perkembangan UMKM telah dihadapkan persaingan pasar yang semakin ketat serta berbagai tantangan dan hambatan. Dalam menghadapi tantangannya, pelaku UMKM dituntut memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Keberlanjutan usaha merupakan aspek penting bagi UMKM dalam menghadapi kondisi lingkungan yang kompetitif. Keberlanjutan usaha adalah kemampuan suatu bisnis untuk menciptakan inovasi dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang (Sugita & Ekayani, 2022).

Keberlanjutan usaha tidak dinilai dari pelaku usaha mempertahankan usahanya dalam jangka pendek, melainkan kapasitas usaha dalam menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan daya saing serta mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi secara berkelanjutan. Keberlanjutan usaha tidak dapat dicapai tanpa adanya faktor pendukung yang memadai. Faktor pendukung dapat diperoleh dari adanya literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia yang memadai serta adopsi atas perubahan teknologi. Dilansir dari Sudarmadji (2025) Kota Surabaya telah berupaya melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui tataran kegiatan dan pelatihan, meski anggaran telah dikucurkan setiap

tahunnya belum banyak bukti bahwa upaya tersebut benar-benar menumbuhkan kemandirian pelaku UMKM. Besar harapan masyarakat agar program pemberdayaan tidak hanya sekadar berjalan, tetapi mampu meningkatkan keberlanjutan UMKM. Salah satu wilayah yang berhasil menerapkan pemberdayaan yang produktif yaitu Kecamatan Sukolilo, Rungkut dan Tenggilis Mejoyo. Pelaku UMKM di wilayah ini tidak hanya dilatih memproduksi barang melainkan difasilitasi hingga tahap pemasaran. Peningkatan jumlah pelaku UMKM di Kota Surabaya mencerminkan bahwa sektor UMKM di Kota Surabaya mampu mempertahankan eksistensinya secara berkelanjutan. Peningkatan jumlah UMKM menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya bertahan terhadap tantangan ekonomi, tetapi mampu berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sehingga menunjukkan keberlanjutan usahanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi mendorong perubahan yang signifikan, seperti adopsi atas metode pembayaran yang semula pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash*) kini mulai beralih ke sistem pembayaran secara digital (*cashless*) (Farida et al., 2019). Dilansir dari Admin (2025) pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Potensi pasar yang luas dan berkembang pesat di Surabaya menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Namun, di balik peluang yang besar pelaku UMKM dihadapkan kendala dalam menghadapi persaingan, kendala yang seringkali terjadi adalah keterbatasan akses dan teknologi. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM dituntut mampu memanfaatkan teknologi seperti pemasaran menggunakan

media sosial, *e-commerce* maupun pembayaran dengan metode digital seperti *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS), hal ini bertujuan agar pelaku UMKM mampu bertahan di era digitalisasi (Setyasih et al., 2025).

Upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, pemberdayaan UMKM di Surabaya dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan perekonomian daerah. Di sisi lain, terdapat temuan serupa yang dilansir Kompas.com (2025) bahwa banyak pedagang di Kota Malang yang mengeluhkan penggunaan QRIS, sehingga dinas terkait tidak dapat memaksa seluruh pedagang mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran. Akar permasalahan yaitu dari kurangnya pemahaman sumber daya manusianya.

Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM dituntut memiliki pemahaman terhadap literasi keuangan, karena dengan dibekali literasi keuangan, hal ini mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan mendorong keberlanjutan usaha di era digitalisasi (Jikrillah & Juniar, 2024). Seseorang dinilai mampu menyusun strategi keuangan yang baik apabila memiliki bekal literasi dan edukasi keuangan yang baik. Dengan demikian, literasi keuangan menjadi aspek penting oleh pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya di era digitalisasi. Menurut Pradipta & Kristanto (2024), literasi keuangan merupakan pemahaman seseorang mengenai berbagai aspek keuangan yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Literasi keuangan berperan dalam membantu pelaku UMKM untuk mengelola berbagai aspek keuangan secara efektif. Pemahaman keuangan yang baik bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan

keuangan yang lebih akurat serta membantu pelaku UMKM dalam memahami risiko dan peluang di era digitalisasi. Literasi keuangan bukan sebatas kemampuan mengelola uang, tetapi juga mencakup kemampuan memahami teknologi yang berbasis transaksi digital.

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas indeks literasi keuangan Indonesia sebagai berikut:

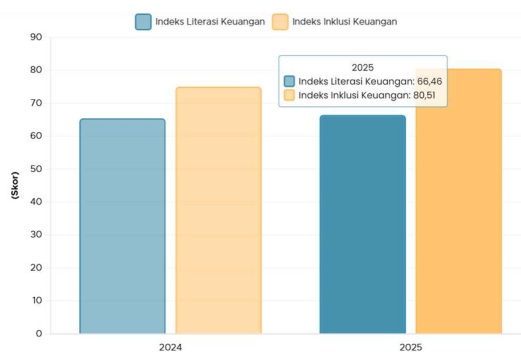


Diagram 1. 1 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2025

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan diagram 1.1, memperlihatkan peningkatan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia (Ariesta, 2025). Pada tahun 2025, indeks literasi keuangan meningkat sebesar 66,46% dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51% setelah meningkat sebesar 65,34% dan 75,02% pada tahun 2024. Hasil indeks literasi keuangan menunjukkan bahwa dari 100 orang terdapat 66 orang mempunyai literasi keuangan baik (*well literate*).

Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan prinsip akuntansi seperti *budgeting* dapat memicu hambatan dalam mengontrol arus kas serta memicu kerancuan antara modal bisnis dan uang pribadi. Ketidakmampuan pelaku UMKM

dalam mengalokasikan modal usaha untuk kebutuhan produksi maupun operasional dapat mengganggu keberlangsungan usaha, akibatnya aktivitas usaha menjadi tidak efisien yang berpotensi pada perolehan laba usaha. Pelaku UMKM yang tidak berbekal pengetahuan dalam menjalankan usaha dan mengelola keuangan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi lambatnya perkembangan dalam menjalankan usahanya bahkan tidak menutup kemungkinan untuk gulung tikar (Andreas & Wibowo, 2023). Didukung oleh penelitian yang diungkapkan oleh Widayanti et al. (2017), Andreas & Wibowo (2023) bahwa pengetahuan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha, karena pengetahuan keuangan mampu mendukung seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan yang sifatnya kompleks. Menurut penelitian yang telah dilakukan terdapat temuan bahwa pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan keuangan yang cukup, terutama karena kurangnya pendidikan. Akibatnya hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki pengetahuan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan temuan yang diungkapkan oleh Irdawati & Nurlia (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM, karena terdapat indikasi bahwa pemahaman keuangan yang lebih tinggi belum tentu diterapkan pada bisnis sehari-hari.

Selain literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam menentukan keberlanjutan usaha. Kualitas sumber daya manusia sangat krusial untuk mengoptimalkan kinerja karyawan atau pelaku usaha, karena pelaku usaha yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai cenderung lebih produktif dan mampu menghadapi segala tantangan yang ada di

lapangan. Sumber daya manusia dipandang lebih berkualitas apabila seseorang mampu menyelesaikan kewajiban dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada (Ronaldo et al., 2025). Era digitalisasi, pelaku UMKM dituntut mampu beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Seseorang yang mampu beradaptasi dengan perubahan dapat memengaruhi strategi bisnis, sehingga mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Sejalan dengan penelitian Inayah et al. (2024), bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha, karena kualitas sumber daya manusia yang baik mampu mengoptimalkan produktivitas dan inovasi. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan temuan yang diungkapkan oleh Simanjuntak & Nuraeni (2024) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Meskipun kualitas sumber daya manusia dianggap penting untuk keberlanjutan usaha, namun kualitas sumber daya manusia tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu keberlanjutan usaha tetapi perlu meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha.

Akibat adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, seperti kemajuan dari adanya sistem pembayaran secara digital, hal ini memicu transformasi besar dalam dunia bisnis. Dilansir dari KOMPAS.Com Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) sebesar 40% diantaranya menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Adanya transaksi digital dapat memudahkan pelaku usaha maupun pembeli, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan pada infrastruktur teknologi dan kualitas jaringan internet yang masih belum merata

di seluruh Indonesia. Rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital juga menjadi salah satu kendala, karena pelaku usaha khawatir akan keamanan data pribadi dalam melakukan transaksi digital. Sejalan dengan penelitian Cahyasari et al. (2025) bahwa penggunaan *Digital Payment* sebagai metode pembayaran mampu meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi, selain itu penggunaan *Digital Payment* berkaitan dengan keberlanjutan usaha khususnya pada era digitalisasi.

Transaksi digital memiliki dampak positif yaitu transaksi dapat menjadi lebih mudah dan cepat, selain itu pencatatan transaksi menjadi lebih transparan dan terstruktur serta mampu mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas (Idris, 2024). Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan yang menyebabkan pelaku usaha ragu untuk menggunakan *digital payment* (QRIS) sebagai metode pembayaran. Peneliti telah melakukan survei pendahulu kepada beberapa pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman, pelaku UMKM menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi pelaku usaha mengadopsi *digital payment* (QRIS) adalah daya saing dan minat pelanggan yang menuntut pelaku UMKM untuk mengadopsi *digital payment* (QRIS). Apabila pelaku UMKM tidak mengadopsi, maka daya minat pelanggan akan menurun sehingga pelaku UMKM kalah saing dengan pesaing yang telah mengadopsi *digital payment* (QRIS).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM lainnya bahwa terdapat temuan pelaku UMKM yang menyatakan dalam penerapan adopsi *digital payment* terdapat hambatan, seperti uang hasil transaksi tidak masuk ke rekening pelaku usaha. Pelaku UMKM mengungkapkan bahwa temuan tersebut

menimbulkan persepsi bahwa penggunaan *digital payment* berpotensi mengurangi pendapatan langsung yang diterima dan menyebabkan pelaku UMKM mengalami kerugian. Selain itu, terdapat pelaku UMKM yang mengungkapkan bahwa penggunaan *digital payment* (QRIS) kurang efisien ketika ramai pelanggan, karena ketika ramai pelanggan fokus pelaku UMKM terpecah sehingga peluang terjadinya kesalahan pengecekan pembayaran serta potensi tindakan tidak jujur dari pelanggan meningkat yang dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM berhenti menggunakan *digital payment* (QRIS) sebagai metode pembayaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat celah penelitian, karena sebagian besar penelitian hanya menitikberatkan pada pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha atau menjelaskan peran kualitas sumber daya manusia secara terpisah. Demikian pula penelitian terkait penggunaan *digital payment* (QRIS), hanya fokus pada bagaimana literasi keuangan memengaruhi keputusan seseorang dalam mengadopsi *digital payment* (QRIS) (Wulandari & Ramadhan, 2025). Didukung dengan fenomena yang ada di lapangan menjadikan penelitian semakin relevan untuk dilakukan, karena seperti yang dijelaskan oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Fred Davis tahun 1986, teori ini menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan dapat memengaruhi seseorang pada niat pengguna dalam menggunakan teknologi. Era digitalisasi menuntut pelaku usaha mampu memanfaatkan adanya teknologi *digital payment* karena kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh sistem *digital payment* seperti QRIS, sehingga upaya tersebut mendorong inklusi keuangan yang

lebih besar terutama di kalangan UMKM (Leksono & Hidayat, 2025). Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji kembali temuan-temuan tersebut dengan objek berbeda serta berusaha menjawab kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan serta dorongan pelaku UMKM dapat memengaruhi bagaimana cara pelaku UMKM mengambil tindakan atau keputusan karena adanya perkembangan teknologi seperti pembayaran non-tunai (*cashless*) untuk keberlanjutan usahanya.

Penelitian ini menyoroti peran literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan *digital payment* dalam mendukung keberlanjutan usaha sebagai upaya pencapaian SDGs 8 dan 9. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga variabel utama yaitu literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan *digital payment* dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM, selain itu penelitian juga mengaitkan bagaimana ketiga variabel tersebut merupakan wujud dari upaya pencapaian SDGs 8 dan 9, karena meski SDGs telah diterapkan selama kurang lebih 6 tahun, pencapaian SDGs di Indonesia tergolong rendah seperti yang ditunjukkan oleh jumlah capaian yang diberi warna merah dan kuning. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memberikan perhatian serta didukung oleh tanggung jawab yang cukup guna mewujudkan tujuan SDGs (A. Wicaksono, 2023). Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji pencapaian tujuan SDGs khususnya SDGs 8 dan 9 pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman.

Mengacu pada uraian diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan, karena literasi keuangan tidak akan efektif tanpa didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai, karena sumber daya manusia yang memadai mampu

memaksimalkan peluang. Selain itu, penggunaan *digital payment* sebagai alat pembayaran semakin relevan di era digitalisasi. Penelitian ini juga mendukung pencapaian SDGs 8 dan 9 yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penguatan inovasi melalui digitalisasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan mendapatkan perspektif yang berbeda tentang seberapa besar pengaruh literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia serta penggunaan *digital payment* mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan judul **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGGUNAAN *DIGITAL PAYMENT* TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs 8 & 9”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yang dijadikan dasar dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Surabaya?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Surabaya?
3. Apakah penggunaan *digital payment* memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Surabaya.
2. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Surabaya.
3. Menganalisis pengaruh penggunaan *digital payment* terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait keberlanjutan usaha, terutama dengan menyoroti pelaku UMKM yang terus beradaptasi di era digitalisasi. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan *digital payment* berinteraksi dalam memengaruhi keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara perkembangan era digitalisasi seperti metode pembayaran yang dilakukan secara digital dengan keberlanjutan usaha, khususnya keterkaitan dengan SDGs 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta SDGs 9 tentang inovasi dan infrastruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sebagai syarat penyelesaian tugas akhir akademik serta sarana untuk memperdalam pemahaman terkait keberlanjutan usaha yang dipengaruhi oleh literasi keuangan, kualitas sumber daya manusia dan penggunaan *digital payment* pada era digitalisasi.
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian lain yang membahas masalah serupa.